



## Atur Ulang Prioritas OPD

# Atur Ulang Prioritas OPD

### SPPD Dipangkas 50 Persen

REPORTER MUH MUCHTASIM  
EDITOR M TAKDIR RIDWAN

**MAKASSAR, FAJAR — Efisiensi anggaran memaksa pemerintah daerah mengatur ulang prioritas unit kerja. Pemprov Sulsel mengatur ulang prioritas OPD.**

**SEBAGAIMANA** Inpres nomor 1 tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran disodorkan pemerintah pusat. Kemudian, diperkuat lagi oleh Surat Edaran Mendagri tanggal 23 Februari 2025 tentang efisiensi APBD.

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rah-

man mengatakan, setiap OPD secara bergilir mengakses desk efisiensi. Beberapa OPD sudah selesai, sisa menyesuaikan terhadap arahan Kemendagri bahwa 50 persen perjalanan dinas (SPPD) ter-pangkas.

Namun, Jufri telah me-negaskan bahwa kebijak-

an ini tidak dapat berlaku pada semua OPD. Sebab, ada juga unit kerja yang efektivitasnya ketika mereka turun langsung ke lapangan. Sehingga, tidak semua OPD akan dipotong 50 persen alokasi SPPD-nya.

Misalnya, Inspektorat dan Dinas Lingkungan Hidup. Ia mencontohkan dua OPD tersebut harus lebih banyak bekerja di lapangan untuk validasi pemeriksaan dan pengecekan penambangan pasir, misalnya.

"Inspektorat itu mesti turun ke lapangan. Ya kalau pemeriksaan secara tanya jawab, bisa aja,

kalau ada orang mau cera-rai, bisa aja lewat virtual, tapi kalau proyek misalnya meninjau jalan. Bisa juga tapi setengah mati orang bawa kamera, tunjukkan ini pak, ini, ini. Tentu lebih enak kalau datang," ulas Jufri, Selasa, 25 Februari.

Jufri juga menyarankan jika kebijakan pemotongan 50 persen perjalanan dinas tidak dapat diganggu, maka harus ada opsi lain. Misalnya, menetapkan besaran anggaran yang mesti jadi saving atau simpanan pada OPD tersebut.

Hal itu dilakukan agar tidak ada alasan bagi OPD untuk tidak bekerja secara maksimal. Karena me-

nurut Jufri, bagaimanapun OPD lebih tahu apa yang prioritas bagi mereka dibanding TAPD. TAPD hanya menerima hasil dari yang telah dilaksanakan OPD.

"Tapi apapun itu, tindakan efisiensi itu bagus, hasil efisiensi kita akan arahkan kepada bidang-bidang yang diprioritaskan seperti arahan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang baru," ungkap Jufri.

Tim Ahli pembantu TAPD Sulsel Prof Murtir Jeddawi memaparkan beberapa penekanan yang harus dipastikan oleh kepala daerah. Misalnya, kegiatan yang tidak memiliki output yang bersentuhan

dengan pelayanan publik, masyarakat, serta kegiatan lainnya bersifat seremonial. "Itu harus dikurangi sehingga surat itu menekankan bahwa penganggaran harus memiliki urgensi," kata Prof Murtir, Senin, 24 Februari.

Pemerintah harus mengalokasikan program yang mendukung asta cita presiden. Ditingkat provinsi perlu mendukung realisasi visi misi Gubernur dan Wagub Sulsel. Dari efisiensi disusun ke kegiatan

pengoptimalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan stabilitas pangan.

"Pak Gubernur membentuk tim efisiensi untuk mendampingi OPD dan TAPD. Tim dibentuk untuk bermitra, memberikan informasi, dukungan, konsultasi supaya arahan Inpres 1 tahun 2025, dan edaran Mendagri 23 Februari betul-betul efektif mendukung kegiatan nasional, dan mewujudkan Sulsel maju dan berkarakter," ulas Prof Murtir. (\*)